

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Konsep

2.1.1 Politik Identitas

Manuel Castells

Manuel Castells menganggap identitas sebagai awal mula munculnya makna utama bagi individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Beliau mengartikan identitas sebagai proses konstruksi makna yang didasari pada karakteristik budaya tertentu, yang dianggap lebih penting daripada sumber makna lainnya dalam membangun kekuatan sosial. Identitas tidak hanya berfungsi sebagai penanda dalam situasi ini, tetapi juga membentuk tindakan sosial serta orientasi politik kelompok (Manuel Castells, 1997).

Castells juga menyatakan bahwa politik identitas muncul ketika identitas digunakan dalam relasi kekuasaan untuk mempertahankan dominasi atau melawannya. Ia mendefinisikan bahwa identitas salah satunya dikatakan sebagai resistensi, yaitu identitas yang berasal dari kelompok yang terpinggirkan sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi. Oleh karena itu, politik identitas dapat didefinisikan sebagai serangkaian peristiwa di mana identitas digunakan sebagai sarana untuk berjuang untuk mempertahankan kekuasaan dalam strukturnya.

Francis Fukuyama

Francis Fukuyama mendefinisikan politik identitas adalah fenomena politik kontemporer yang berakar pada keinginan manusia untuk pengakuan. Ia menjelaskan bahwa pengakuan identitas seperti etnis, agama, dan budaya menjadi

penggerak utama dalam perkembangan politik modern. Fokus politik sekarang tidak hanya pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada kebutuhan untuk mengakui identitas dan martabat kelompok (Francis Fukuyama, 2018).

Selain itu, Fukuyama menegaskan bahwa politik identitas sering muncul sebagai tanggapan atas perasaan kelompok lain yang tidak diakui atau dipinggirkan. Kondisi ini dapat mendorong kelompok tertentu untuk memperjuangkan identitasnya dalam politik dan ruang publik. Akibatnya, meskipun politik identitas dapat membantu mendukung keadilan, itu juga dapat menyebabkan konflik apabila digunakan untuk menyingkirkan kelompok lain.

Mary Bernstein

Pendapat Mary Bernstein mengatakan politik identitas adalah jenis tindakan politik yang berfokus pada ekspresi, penguatan, dan perjuangan identitas kelompok tertentu. Ia menjelaskan bahwa politik identitas melibatkan struktur kekuasaan dan elemen budaya dan simbolik di mana identitas digunakan sebagai dasar untuk mengartikulasikan tuntutan politik (Mary Bernstein, 2005).

Selain itu, Bernstein menyatakan bahwa politik identitas berasal dari gerakan sosial yang berusaha mendorong pengakuan terhadap identitas dan pengalaman kelompok yang terpinggirkan sebelumnya. Dalam kasus ini, politik identitas tidak hanya berusaha untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi juga untuk mengubah cara masyarakat melihat identitas tersebut. Akibatnya, politik identitas menjadi bagian dari dinamika politik yang mengaitkan kekuasaan, budaya, serta perjuangan sosial.

Pemikiran Manuel Castells, Francis Fukuyama, dan Mary Bernstein memberikan landasan penting dalam memahami politik identitas sebagai

penggunaan identitas kelompok seperti etnis, agama, dan budaya untuk membangun makna, memperjuangkan pengakuan, dan juga mempengaruhi relasi kekuasaan dalam ranah sosial dan politik. Identitas bukan diartikan hanya sebagai sekadar penanda, melainkan alat strategis bagi kelompok dalam menegaskan eksistensi dan merespons dinamika sosial yang mereka alami. Dalam konteks penelitian ini, politik identitas diartikan sebagai bagaimana identitas etnis Tionghoa dipersepsikan oleh masyarakat, serta bagaimana persepsi tersebut membentuk pola interaksi sosial. Identitas dipandang tidak hanya sebagai sesuatu yang melekat secara alami, melainkan sebagai konstruksi yang terbentuk melalui pandangan, pengalaman, serta interaksi sosial dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini, beberapa indikator akan digunakan untuk memeriksa politik identitas secara lebih khusus. Indikator-indikator ini termasuk (1) persepsi masyarakat terhadap etnis Tionghoa, (2) jenis relasi sosial yang terbentuk antara etnis Tionghoa dan masyarakat lokal, (3) adanya kecenderungan untuk melabelkan atau stereotip kelompok tertentu, dan (4) kemungkinan munculnya batas sosial yang membedakan kelompok-kelompok tertentu. Sejauh mana identitas mempengaruhi dinamika sosial yang membentuk praktik politik identitas, indikator-indikator ini digunakan.

2.1.2 Teori Tindakan Sosial (Max Weber)

Maximilian Weber lahir pada 21 April 1864 dan meninggal pada 14 Juni 1920. Ia adalah seorang ekonom politik, sosiolog, dan geografer yang berasal dari Jerman. Ayah Max Weber ialah seorang pejabat pemerintah yang memegang posisi politik

yang cukup signifikan. Sebagai seorang yang cenderung mengutamakan kenikmatan dunia, sikap ayahnya sangat kontras dengan ibunya. Ibu Max Weber adalah seorang penganut Calvinisme yang sangat patuh akan ajaran agamanya. Dalam perjalanan hidupnya Weber menjabat sebagai profesor di Freiburg dari tahun 1894 hingga 1897, kemudian di Heidelberg sejak tahun 1897, dan di Munchen dari tahun 1919 hingga 1920. Salah satu pemikiran terkenal yang masih relevan hingga kini adalah teori tindakan sosial. Weber meyakini bahwa setiap aksi individu mempunyai makna subjektif yang mendasari tindakan tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebuah tindakan dapat dianggap sebagai tindakan sosial jika tindakan itu mempunyai arti bagi pelakunya dan ditujukan kepada orang lain. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap lingkungan eksternal, tetapi juga sebagai hasil dari interpretasi individu terhadap konteks sosial mereka (Fikria, M., & Moefad, A., 2024).

Berdasarkan pandangan Weber, tindakan sosial juga berlandaskan pada kesadaran pribadi dan dimulai dari situ. Perilaku orang yang satu adalah satu kesatuan untuk dianalisis. Menurut Weber, kajian tentang kehidupan sosial yang hanya melihat dari luar pranata dan struktur sosial, seolah-olah tanpa melihat cerita di dalamnya, sehingga mengabaikan aspek pengendalian diri oleh individu, tidak dapat mencapai elemen penting dan mendasar dalam kehidupan sosial itu.

Menurut pandangan Max Weber, tidak semua perilaku manusia bisa digolongkan sebagai perilaku sosial. Sebuah perilaku hanya dapat dianggap sebagai perilaku sosial jika memiliki arti khusus dan terhubung dengan keberadaan individu lain dalam konteks sosial. Karena itu, Weber menegaskan bahwa perilaku sosial

seharusnya ditafsirkan tidak hanya berdasarkan penampilannya, tetapi juga berdasarkan makna yang mendasarinya. Adapun karakteristik dari perilaku sosial adalah sebagai berikut:

a. Memiliki Makna Subjektif

Tanda utama dari perilaku sosial adalah adanya interpretasi yang bersifat pribadi yang diberikan oleh individu atas tindakannya. Ini berarti bahwa setiap perilaku yang dilakukan memiliki makna tertentu bagi pelaksana, baik berupa tujuan, sebab, maupun dorongan yang mendasarinya. Arti atau makna ini tidak selalu terlihat secara jelas dari luar, sehingga diperlukan pemahaman yang lebih mendalam untuk dapat mengungkapnya. Dalam konteks ini, perilaku sosial tidak dapat dipahami hanya pengamatan terhadap aktivitas, tetapi juga harus memperhitungkan sudut pandang individu yang melakukan perilaku tersebut. Dengan demikian, interpretasi subjektif menjadi elemen penting dalam memahami perilaku sosial (Fathiha, 2022).

b. Berorientasi Kepada Orang Lain

Tindakan sosial selalu berhubungan atau berorientasi pada orang lain, baik secara langsung ataupun tidak. Dengan kata lain, saat seseorang melakukan sesuatu, ia akan memikirkan keberadaan, tanggapan, atau perilaku orang-orang di sekitarnya. Tindakan yang diambil tanpa mempertimbangkan orang lain tidak dianggap sebagai tindakan sosial menurut Weber. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat terpisah dari interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu, tindakan sosial selalu berlangsung dalam konteks hubungan antar individu dalam komunitas.

c. Memiliki Tujuan atau Motivasi Tertentu

Tindakan sosial dilakukan dengan alasan atau dorongan tertentu yang mendasarinya. Alasan tersebut bisa bersifat logis, seperti ingin mencapai hasil tertentu, atau bersifat emosional, yang dipicu oleh nilai-nilai. Setiap orang memiliki motivasi unik dalam melakukan tindakan tertentu, yang dipengaruhi oleh kepentingan, kebutuhan, serta keyakinan yang mereka miliki. Maka karena itu, tindakan sosial bukanlah hal yang terjadi secara acak atau kebetulan, tetapi hasil dari pertimbangan tertentu, baik yang disadari maupun yang tidak. Pemahaman yang dihadapkan pada poin penting ini dapat menjelaskan arah dan makna dari suatu tindakan sosial.

d. Dipengaruhi oleh Situasi Sosial

Tindakan sosial selalu terkait dengan latar belakang sosial yang menyertainya, termasuk keadaan lingkungan, budaya, dan pengalaman pribadi. Elemen-elemen tersebut berpengaruh pada cara individu memahami dan bereaksi terhadap situasi dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang tidak mungkin dipisahkan dari lingkungan sosial yang mereka hadapi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang tindakan sosial, penting untuk memperhatikan kondisi sosial yang memengaruhi perilaku tersebut. Dengan kata lain, tindakan sosial senantiasa berhubungan erat dengan pergerakan kehidupan masyarakat.

e. Dapat dipahami Melalui Pendekatan Interpretatif

Tindakan sosial bisa dipahami dengan menggunakan pendekatan interpretatif yang berfokus pada pengertian subjektif dari perspektif individu yang terlibat.

Metode ini dikenal dengan istilah *verstehen*, yang merupakan salah satu ciri khas dari pemikiran Max Weber. Dengan pendekatan ini, para peneliti tidak hanya menjelaskan tindakan secara objektif, tetapi juga berupaya untuk memahami alasan dan makna yang mendasari tindakan tersebut. Ini sangat signifikan karena arti yang dimiliki oleh individu seringkali berbeda dari pandangan orang lain terhadap tindakan tersebut. Sebabnya, pendekatan interpretatif menjadi alat yang sangat penting untuk mengetahui tindakan sosial dengan lebih jauh lagi.

Konsep *Verstehen*

Konsep *verstehen* yang diperkenalkan oleh Max Weber adalah pendekatan untuk memahami secara interpretatif makna yang bersifat subjektif dari tindakan sosial seseorang. Menurut Weber, sebuah tindakan tidak dapat dijelaskan hanya dengan melihat aspek fisik atau perilaku yang terlihat, tetapi harus ditelusuri berdasarkan arti atau makna yang diberikan oleh individu terhadap tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, *verstehen* menggarisbawahi pentingnya memahami perspektif atau sudut pandang individu sebagai aktor dalam masyarakat, agar peneliti bisa memahami alasan, dorongan, dan konteks yang mendasari suatu tindakan.

Lebih jauh lagi, *verstehen* menjadi cara yang krusial dalam analisis sosial karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman serta penafsiran subjektif individu secara mendalam. Pendekatan ini sangat penting dalam penelitian kualitatif, di mana peneliti berusaha untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang pelaku, bukan hanya fokus pada pengukuran hubungan antara variabel. Konsep *verstehen* diterapkan untuk menggali arti di balik perilaku

komunitas Tionghoa yang dianggap sebagai kelompok tertutup oleh masyarakat lokal. Dengan cara ini, penelitian tidak hanya memandang tindakan tersebut sebagai fenomena sosial, tetapi juga berusaha mengungkap makna yang mendasari berdasarkan perspektif komunitas Tionghoa itu sendiri (Gann, 2017).

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber fokus pada motif dan tujuan dari para pelaku. Dengan teori ini, kita dapat memahami berbagai jenis perilaku yang ditunjukkan oleh individu maupun kelompok. Mengetahui perilaku masing-masing individu atau kelompok juga berarti memberikan penghargaan serta memahami alasan di balik tindakan mereka. Ketika seseorang memberi arti subjektif pada tindakannya, maka akan terjadi interaksi sosial. Menurut Weber, hubungan sosial adalah suatu tindakan di mana ada beberapa aktor yang berbeda, dan selama tindakan itu memiliki makna interaksi serta mengarah kepada tindakan orang lain. Setiap individu berinteraksi dan saling merespon. Max Weber mengategorikan tindakan sosial menjadi empat jenis, yaitu: tindakan tradisional, tindakan afektif, tindakan rasional instrumental, dan tindakan rasional nilai.

1. Tindakan Tradisional

Tindakan yang dipengaruhi oleh kebiasaan serta tradisi yang sudah ada sejak lama dan terus dilakukan. Kegiatan semacam ini umum dilakukan di komunitas yang masih memegang kuat tradisi, sehingga dalam melaksanakannya, mereka tidak berpikir kritis atau merenungkan terlebih dahulu karena sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka. Situasi ini bisa menghasilkan kebiasaan yang selalu dijaga hingga saat ini. Hal ini sejalan dengan pendapat Weber yang menyatakan

bahwa sebuah tindakan dianggap berhasil jika tindakan tersebut benar-benar ditujukan kepada individu maupun orang lain (Ritzer & Stepnisky, 2017).

2. Tindakan Afektif

Tipe tindakan sosial ini lebih banyak dipengaruhi oleh emosi atau perasaan tanpa adanya pemikiran mendalam atau perencanaan yang jelas. Tindakan afektif bersifat mendadak, tidak berbasis logika, dan merupakan ungkapan sebuah emosional individu, seperti ketakutan, kemarahan, empati, atau cinta. Dalam jenis perilaku ini, individu tidak selalu menggunakan pikiran rasional, melainkan lebih dipengaruhi oleh perasaan yang mereka alami saat itu. Sebagai contoh, seseorang bisa menjadi lebih tertutup karena pernah mengalami perlakuan diskriminatif atau konflik sosial pada masa lalu, sehingga timbul rasa takut atau kurang percaya terhadap orang-orang di sekitarnya. Dalam studi ini, tindakan afektif dapat muncul sebagai reaksi emosional dari etnis Tionghoa terhadap pengalaman sejarah yang memengaruhi cara mereka berinteraksi.

3. Rasional Instrumental

Tindakan ini adalah suatu aksi sosial yang dilakukan oleh individu dengan mempertimbangkan pilihan dan keputusan yang sadar. Dalam hal ini, orang tersebut secara sengaja menilai berbagai kemungkinan dan dampak yang mungkin muncul sebelum mengambil langkah. Dengan kata lain, aksi ini sangat fokus pada hasil dan menggunakan pemikiran logis sebagai dasar utama dalam bertindak. Sebagai contoh, seseorang dapat membatasi kegiatan sosialnya karena mempertimbangkan adanya risiko tertentu, seperti menghindari perselisihan atau melindungi diri. Dalam konteks penelitian, situasi ini terlihat ketika kelompok etnis Tionghoa

memilih untuk lebih selektif dalam berinteraksi sebagai strategi bijaksana untuk mempertahankan stabilitas sosial mereka.

4. Tindakan Rasional Nilai

Tindakan rasional yang mengutamakan nilai merupakan perilaku yang berlandaskan pada keyakinan terhadap nilai-nilai tertentu yang dianggap signifikan, seperti nilai-nilai budaya, agama, atau moral. Berbeda dengan tindakan rasional yang berorientasi pada hasil, jenis tindakan ini tidak terlalu fokus pada hasil akhir, justru lebih menitikberatkan pada kesesuaian antara tindakan dan nilai-nilai yang diyakini. Misalnya, seseorang mungkin terus melestarikan tradisi budaya tertentu meskipun tidak membawa manfaat praktis. Dalam konteks penelitian, orang-orang Tionghoa dapat menjaga batasan sosial tertentu sebagai upaya untuk mempertahankan nilai-nilai budaya serta identitas kelompok (Ritzer & Stepnisky, 2017).

Teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber memiliki relevansi yang kuat dalam penelitian ini karena memberikan kerangka analisis untuk memahami perilaku sosial berdasarkan makna subjektif yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Dalam konteks penelitian mengenai etnis Tionghoa di Kota Tasikmalaya, teori ini membantu menjelaskan bahwa perilaku yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai sikap tertutup tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai karakter sosial semata. Sebaliknya, perilaku tersebut perlu dianalisis lebih dalam untuk mengetahui makna yang melatarbelakanginya, seperti pengalaman historis, kondisi sosial, maupun strategi adaptasi dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, Max Weber menekankan pentingnya memahami tindakan sosial dari sudut pandang pelaku melalui pendekatan *verstehen*. Ini sejalan dengan pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yang berupaya menggali pengalaman dan perspektif orang Tionghoa secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada persepsi masyarakat terhadap etnis Tionghoa, tetapi juga berusaha memahami bagaimana orang Tionghoa memaknai tindakan mereka sendiri dalam interaksi sosial. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenotip etnis Tionghoa.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada teori tindakan sosial Max Weber. Teori ini membantu menjembatani perbedaan antara persepsi masyarakat dan realitas yang dialami oleh orang Tionghoa. Penelitian ini mengeksplorasi makna subjektif di balik tindakan sosial. Ini mengungkap bukan hanya bagaimana suatu perilaku muncul, tetapi juga mengapa kelompok berbeda melihatnya dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, teori ini berfungsi sebagai alat analisis utama untuk mengeksplorasi dinamika sosial yang lebih mendalam. Selain itu, itu juga mendukung upaya penelitian untuk mengungkap kompleksitas relasi sosial dalam masyarakat multikultural.

2.1.3 Pengakuan Politik (Charles Taylor)

Seorang filsuf bernama Charles Taylor lahir di kota Montreal, Quebec, Kanada pada tanggal 5 November tahun 1931. Sebagai seorang filsuf, ia memiliki cakupan studi dan refleksi yang banyak, meliputi filsafat ilmu sosial, filsafat politik, dan sejarah pemikiran. Taylor memperkenalkan gagasan sebuah konsep

yang bernama "politik pengakuan" atau *politics of recognition* sebagai kebutuhan fundamental manusia untuk memperoleh suatu pengakuan akan identitas dalam konteks hubungan sosial-politik dengan kelompok lain. Secara etimologis, kata pengakuan berarti "menemukan kembali" atau memahami perihal sesuatu ataupun seseorang lagi yang hakekatnya berakar dari kata kerja Latin *cognoscere* yang berarti mengetahui, ditambah dengan prefiks "*re*". Berdasarkan etimologi ini, pengakuan diartikan sebagai suatu tindakan atau sikap untuk memperoleh pengetahuan kembali, yang memungkinkan kita untuk memandang orang yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang berbeda, dengan "pandangan baru". Dalam kata lain, ada perhatian yang serius terhadap karakteristik atau aspek yang mungkin tidak kita sadari atau lihat pada awal pengenalan. Konsep pengakuan mulai muncul dalam diskursus politik pada perkiraan akhir abad ke-20. Dimana pada akhirnya diskursus ini kemudian berkembang menjadi isu yang penting dalam etika politik postmodern sekitar abad 21 (Reza A. A, 2019).

Konsep pengakuan dalam politik yang diajukan oleh Charles Taylor dalam artikelnya "The Politics of Recognition", yang terdapat dalam buku *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition* (1994), inti dari teori politik pengakuan terletak pada pemahaman bahwa identitas manusia bersifat dialogis atau interaktif dan terbentuk melalui hubungan sosial. Identitas tidak muncul secara terpisah dan tertutup, melainkan tumbuh melalui interaksi, pengakuan, serta tanggapan dari orang lain dalam konteks sosial. Oleh karena itu, pengakuan bukan sekadar tindakan sopan atau norma sosial, tetapi merupakan kebutuhan fundamental yang berhubungan dengan harga diri manusia. Ketika

seseorang atau suatu kelompok tidak diakui atau mengalami kesalahan pengakuan, hal ini dapat menyebabkan penyimpangan identitas dan ketidakadilan moral. Dengan demikian, pengakuan menjadi masalah politik karena berkaitan dengan bagaimana negara dan masyarakat memperlakukan identitas individu serta kelompok dalam kehidupan bersama.

Taylor menekankan bahwa ketidakmampuan untuk memberikan pengakuan, adanya “misrecognition” (pengakuan yang salah atau keliru) dapat menjadi bentuk penindasan yang nyata. Ketika individu atau kelompok digambarkan secara negatif, distereotip, atau identitas mereka diabaikan, kondisi ini tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga bisa menciptakan identitas yang salah dan merusak martabat kolektif. Dalam hal ini, politik pengakuan diartikan sebagai tuntutan agar identitas individu dan kelompok dapat diakui secara sah, bermartabat, dan setara dalam konteks sosial. Dengan demikian, pengakuan menjadi dasar penting dalam membangun hubungan sosial yang adil dalam masyarakat yang beragam.

Dalam esai Charles Taylor yang berjudul *The politics of recognition*, teori pengakuan dalam politik yang diajukan oleh Charles Taylor tidak muncul begitu saja, melainkan berakar pada dinamika sosial dan politik di Kanada, khususnya terkait identitas dan permintaan otonomi budaya masyarakat berbahasa Prancis di Quebec yang terjadi antara tahun 1960 hingga 1990, pada saat itu Quebec mengalami gelombang nasionalisme yang pesat melalui gerakan Quiet Revolution, yang menginginkan pengakuan atas bahasa, budaya, dan identitas orang-orang berbahasa Prancis dalam kerangka negara Kanada yang didominasi oleh tradisi Anglo-Saxon. Diskusi mengenai kebijakan bahasa, hak kolektif, dan status politik

Quebec menimbulkan pertanyaan mendasar tentang bagaimana negara yang menganut sistem liberal memperlakukan perbedaan budaya serta identitas minoritas. Dalam konteks ini, Taylor mengemukakan pemikirannya bahwa pengakuan terhadap identitas bukan hanya soal toleransi, melainkan juga merupakan kebutuhan moral yang sangat penting bagi pengakuan martabat manusia.

Pemikiran ini kemudian disusun dengan teratur dalam esai yang diterbitkan dalam *Multiculturalism and the Politics of Recognition*. Taylor mengkritisi paham liberal yang hanya fokus pada kesetaraan formal tanpa memberikan kesempatan untuk pengakuan atas berbagai identitas. Ia berpendapat bahwa ketidakmampuan untuk mengakui identitas kolektif, seperti yang dialami oleh masyarakat Quebec, dapat menyebabkan perasaan terasing dan distorsi identitas. Oleh karena itu, teori politik pengakuan muncul sebagai sebuah respon filosofis terhadap masalah nyata multikulturalisme dan perjuangan identitas dalam masyarakat modern, khususnya di Kanada.

Mengacu dalam ruang lingkup Indonesia, gagasan ini diteliti dalam kerangka keberagaman sosial dan multikulturalisme, di mana Taylor menekankan bahwa untuk memiliki masyarakat yang sehat, perlu ada penghargaan atau pengakuan terhadap semua identitas secara adil tanpa memaksakan keseragaman budaya dan nilai-nilai (Wattimena, *Studia Philosophica et Theologica*. Taylor memberikan dasar normatif yang mendukung terhadap penghargaan dan penghormatan terhadap keberagaman serta ikatan dialog antar *Socio Religia* atau kelompok (Reza A. A, 2019). Taylor mengemukakan rekognisi identitas untuk

memastikan adanya pengakuan terhadap individu serta kumpulan minoritas yang sejarahnya mengalami penderitaan akibat beragam gerakan politik. Menurut Taylor, pengakuan adalah suatu kebutuhan dalam menjaga kebebasan, kesetaraan, martabat bersama, serta pengakuan terhadap eksistensi orang lain (Dr. Chahida, 2024).

a. Identitas Dialogis

Menurut pandangan Charles Taylor, identitas manusia bersifat dialogis, yang berarti bahwa pengembangan jati diri tidak berlangsung secara terpisah dan sendirian, melainkan melalui interaksi di dalam lingkungan sosial. Seseorang mengerti siapa dirinya melalui pengakuan, reaksi, dan hubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, identitas bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersifat pribadi, melainkan yang terbentuk dalam hubungan sosial yang penuh dengan nilai dan makna. Dalam masyarakat yang beragam budaya, pengakuan dari kelompok lain menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas kolektif suatu komunitas (Ikäheimo, H. 2020).

Lebih jauh, Taylor mengungkapkan bahwa karena identitas bersifat dialogis, pengakuan dari orang lain menjadi kebutuhan moral dasar. Pengakuan tidak hanya sekadar etiket sosial, tetapi juga merupakan elemen penting dalam pembentukan identitas itu sendiri. Ketika individu atau kelompok mendapatkan pengakuan yang setara, identitas mereka dapat tumbuh dengan otentik; sebaliknya, apabila pengakuan tersebut terdistorsi atau diabaikan, maka pembentukan identitas juga bisa mengalami hambatan. Dengan demikian, di dalam masyarakat yang multikultural, hubungan antara mayoritas dan minoritas tidak bisa dipisahkan dari

masalah bagaimana pengakuan sosial dapat membentuk, membatasi, atau mendukung ekspresi identitas kolektif.

b. Misrecognition

Dalam pandangan Charles Taylor, misrecognition (salah pengakuan) berarti situasi di mana identitas individu atau kelompok tidak diakui dengan tepat, setara, dan bermartabat dalam masyarakat. Dalam esainya yang berjudul *The Politics of Recognition*, yang dimuat dalam buku *Multiculturalism and The Politics of Recognition*, Taylor menekankan bahwa pengakuan lebih dari sekadar bentuk sopan sosial, melainkan merupakan sebuah kebutuhan penting untuk membangun identitas. Ketika individu atau kelompok dipersepsikan melalui stereotip, diperkecil, atau hanya diakui secara formal tanpa penghargaan yang berarti, hal ini berpotensi menciptakan distorsi terhadap identitas. Taylor bahkan menyatakan bahwa misrecognition atau nonrecognition dapat menyebabkan kerugian nyata karena bisa “mengurung” individu dalam citra diri yang sempit dan terbatas.

Lebih lanjut, kesalahan pengakuan memiliki aspek moral dan politik karena berkaitan langsung dengan martabat individu. Dalam konteks masyarakat yang beragam, hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas sering kali menjadi tempat terjadinya kesalahan pengenalan, terutama ketika identitas kelompok minoritas hanya ditoleransi, tanpa pengakuan yang setara. Situasi ini dapat menciptakan ketidakseimbangan simbolis, di mana satu identitas menjadi unggul dan dianggap sebagai standar, sementara identitas lainnya harus beradaptasi. Oleh sebab itu, menurut Taylor, perjuangan untuk pengakuan bukan hanya masalah administratif atau hukum, namun juga usaha untuk mendapatkan pengakuan yang

sejati dan setara agar identitas dapat berkembang tanpa adanya tekanan dari struktur sosial.

c. Equal Dignity & Difference

Dalam pandangan Charles Taylor, terdapat dua aliran utama dalam politik pengakuan, yaitu martabat yang setara dan politik perbedaan. Konsep martabat yang setara berasal dari tradisi liberal modern yang menekankan bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama dan harus diperlakukan setara di depan hukum serta dalam konteks publik. Prinsip ini menuntut agar negara bersikap netral terhadap perbedaan identitas, sehingga semua warga negara mendapatkan hak yang sama tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Namun, pendekatan ini seringkali melihat kesetaraan dalam kerangka yang “seragam” dan universal, tanpa selalu memperhatikan keunikan identitas kelompok tertentu.

Sebaliknya, politik perbedaan menegaskan bahwa keadilan tidak hanya bergantung pada perlakuan yang seragam, tetapi juga memerlukan pengakuan atas keunikan identitas budaya, agama, atau komunitas tertentu. Menurut Taylor dalam esainya di *Multiculturalism and The Politics of Recognition*, pentingnya pengakuan terhadap perbedaan muncul karena identitas kolektif memiliki nilai yang tidak bisa dipangkas menjadi satu standar universal. Oleh karena itu, ketegangan antara martabat yang setara dan perbedaan muncul ketika prinsip kesetaraan formal tidak selalu menjamin adanya pengakuan yang substansial untuk kelompok minoritas dalam masyarakat yang multikultural.

Rekognisi identitas menurut Taylor menjadi sangat krusial karena berhubungan dengan keberadaan individu atau kelompok tertentu. Identitas yang tidak diakui

rentan mengalami perlakuan diskriminatif dari masyarakat maupun negara. Ini merupakan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Taylor mengenai perlunya rekognisi identitas. Konsep keaslian ideal mulai diperkenalkan sejak abad ke-18, yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia. Menurut Taylor, terwujudnya masyarakat demokratis tidak akan terjadi secara otomatis, selalu memerlukan pemikiran tentang martabat yang menghargai identitas individu atau kelompok. Selain itu, identitas kadang terbentuk melalui dialog, dan kadang melalui perjuangan. Oleh karena itu, identifikasi identitas tidak muncul dari isolasi, tetapi dari interaksi dialogis dengan orang lain. Pembentukan semacam ini sangat bertentangan dengan konsep masyarakat monologis yang tidak menyediakan ruang untuk dialog dalam kehidupan manusia. Dalam ranah masyarakat demokratis yang sehat, Taylor menyebutkan:

Equal recognition is not just the appropriate mode for a healthy democratic society. Its refusal can inflict damage on those who are denied it.

Dalam pembahasan mengenai rekognisi, Taylor membedakan dua ruang atau arena. Tingkat pertama adalah lingkup intim (intimate sphere), di mana pembentukan identitas dan diri berlangsung dalam dialog berkelanjutan dan dalam pengakuan yang berarti dengan orang lain. Tingkat kedua adalah lingkup publik (public sphere), di mana politik pengakuan yang setara memainkan peran yang lebih signifikan (Muhammad Khoirul, 2023).

Ruang lingkup intim (intimate sphere)

Dalam pandangan Charles Taylor, proses pembentukan identitas sangat dipengaruhi oleh hubungan yang bersifat dialogis. Salah satu konteks kunci dari pembentukan ini adalah area intim, yaitu hubungan pribadi atau personal seperti keluarga, teman, dan komunitas terdekat. Di dalam area ini, pengakuan terjadi secara emosional, langsung, dan sangat mendalam. Taylor menyatakan bahwa identitas seseorang tumbuh melalui interaksi dengan "significant others", sehingga pengakuan ataupun penolakan dalam ruang intim dapat memberikan pengaruh besar terhadap harga diri dan pembentukan identitas. Jika terjadi kesalahan pengakuan dalam konteks ini, individu bisa mengalami distorsi dalam citra diri, karena hubungan ini adalah bagian penting dari proses identifikasi sosial.

Ruang lingkup (public sphere)

Ruang publik mengacu pada area sosial yang lebih luas di mana identitas dibentuk secara bersama, seperti yang terjadi dalam masyarakat, lembaga, dan struktu sosial. Dalam pandangan politik pengakuan yang dikemukakan oleh Taylor, ruang publik menjadi tempat penting untuk perjuangan pengakuan identitas bersama, terutama dalam masyarakat yang beragam. Pengakuan yang ada di ruang publik dapat bersifat simbolis dan struktural; jika pengakuan itu hanya diberikan secara resmi tanpa adanya penerimaan sosial yang setara, hal ini dapat menyebabkan adanya misrecognition yang lebih halus meskipun memiliki dampak pada martabat masyarakat yang minoritas.

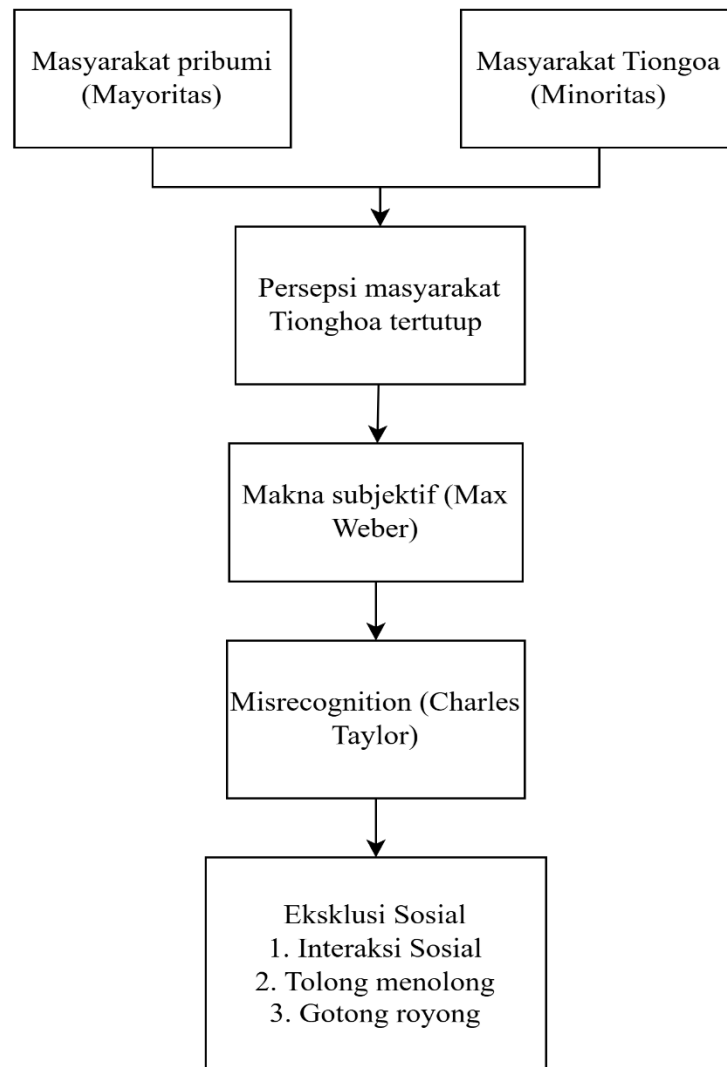
Dalam studi ini, teori pengakuan dalam politik digunakan untuk mengkaji bagaimana masyarakat memandang etnis Tionghoa yang sering dianggap sebagai

komunitas tertutup, terutama di Kota Tasikmalaya. Pandangan ini dapat dilihat sebagai bentuk kesalahan pengenalan atau *misrecognition*, di mana identitas etnis Tionghoa disederhanakan menjadi stereotip tertentu yang mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang mereka alami. Sebenarnya, perilaku yang dianggap eksklusif dapat memiliki arti yang berbeda dari perspektif kelompok tersebut, seperti upaya untuk menjaga keamanan, mempertahankan budaya, atau sebagai respons terhadap sejarah yang telah mereka alami.

Dengan demikian, melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya meneliti bagaimana persepsi terbentuk, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana ketidakseimbangan dalam pengakuan dapat mempengaruhi hubungan sosial antara masyarakat setempat dan etnis Tionghoa. Dalam konteks ini, teori pengakuan politik dari Charles Taylor berfungsi sebagai kerangka utama untuk memahami ketimpangan dalam pengakuan identitas, yang pada akhirnya dapat menyebabkan jarak sosial atau kesalahpahaman antar kelompok di dalam masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Hubungan antara kelompok mayoritas dan minoritas dalam masyarakat, terutama hubungan antara masyarakat pribumi sebagai kelompok mayoritas dan etnis Tionghoa sebagai kelompok minoritas di Kota Tasikmalaya, menjadi titik dasar penelitian ini. Perbedaan posisi status atau label ini bukan hanya dianggap

sebagai perbedaan identitas, mereka juga dapat mempengaruhi cara orang melihat mereka dan cara interaksi antar kelompok terjadi di masyarakat.

Teori makna subjektif Max Weber membantu penelitian ini memahami proses tersebut. Menurut Weber, tindakan dan pandangan seseorang dalam masyarakat didasarkan pada makna yang mereka berikan terhadap fenomena sosial. Oleh karena itu, gagasan bahwa orang Tionghoa tertutup dapat dipahami sebagai akibat dari konstruksi makna masyarakat yang subjektif tentang perbedaan identitas yang ada. Makna subjektif yang diciptakan ini kemudian memengaruhi bagaimana orang-orang memperlakukan kelompok minoritas dalam relasi sosial yang nantinya akan terhubung dengan Politik Pengakuan dari Charles Taylor. Eksklusi sosial terhadap komunitas Tionghoa dipetakan dengan lebih jelas melalui tiga aspek dalam praktik sosial, yaitu interaksi sosial, tolong menolong, dan gotong royong. Dalam aspek interaksi sosial, eksklusi tampak melalui terbatasnya komunikasi dan hubungan sehari-hari, di mana relasi yang terbentuk cenderung bersifat formal dan tidak pribadi, sehingga tidak menumbuhkan kedekatan sosial yang menyeluruh. Pada aspek tolong menolong, eksklusi terlihat dari kurangnya partisipasi dalam praktik saling membantu di antara warga, baik dalam konteks individu maupun komunitas, yang menunjukkan adanya batasan sosial yang tidak terlihat yang memengaruhi sebaran solidaritas. Sementara itu, pada aspek gotong royong, eksklusi tercermin pada rendahnya partisipasi dalam kegiatan bersama seperti kerja bakti atau perayaan, yang secara budaya merupakan wadah penting untuk memperkuat ikatan sosial.